

**ANALISIS KELAYAKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN:
KEMAJUAN DAN TANTANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIDOARJO PADA PENANGANAN STUNTING
SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana

Ilmu Sosial (S.Sos) dalam bidang Ilmu Politik



Muhammad Amir Batistuta Ely

NIM: 10020120055

**Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Oktober 2023**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan terhadap Proposal Skripsi yang ditulis oleh

Nama : Muhammad Amir Batistuta Ely

NIM : 10020120055

Program Studi : Ilmu Politik

Berjudul *Meninjau Implementasi Kebijakan Preventif :Kemajuan dan Tantangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Terhadap Stunting*, saya berpendapat bahwa Proposal Skripsi tersebut dapat diujukan agar mahasiswa yang bersangkutan memperoleh izin untuk melanjutkan ke tahap Penelitian Skripsi.

Surabaya, 13 November 2023

Dosen Pembimbing,

Holilah, S.Ag, M.Si

NIP: 197610182008012008

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	2
DAFTAR ISI	3
MOTTO.....	5
ABSTRAK.....	6
KATA PENGANTAR.....	7
BAB I	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	9
B. Fokus Penelitian	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kajian Pustaka.....	15
BAB II	23
PERSPEKIF TEORITIS DAN ARGUMENTASI UTAMA.....	23
A. Perspektif Teoritis	23
B. Analisis Kebijakan Publik (<i>William Dunn</i>).....	31
C. Argumentasi Utama	34
BAB III.....	36
METODE PENELITIAN	36
F. Metode Penelitian.....	36
1. Jenis dan Problema Penelitian	36
2. Unit dan Peringkat Analisis.....	36
3. Situasi Sosial, Sampel dan Teknik Sampling	37
4. Teknik Pengumpulan Data.....	38
5. Teknik Analisis Data.....	39
G. Rencana Sistematika Skripsi	40
BAB IV.....	42
TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Pengantar.....	42
B. Kondisi Geografis Kabupaten Sidoarjo.....	42
C. Kelembagaan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.	43

D. Visi dan Misi Dinas Kesehatann Kabupaten Sidoarjo	44
E. Sumber Daya Dinas Kesehatan.....	44
F. Sarana dan Prasana Dinas kesehatan.....	48

MOTTO

في بل ،أغصانها في ليست ثقته لأن ،أغصانها كسر من أبدًا يخاف لا الشجرة على يجلس الذي الطائر"
”الطيران على قدرتها

“Seekor burung yang duduk di atas pohon, tidak pernah takut Rantingnya patah, karena kepercayaanya bukan pada dahannya, tapi pada kemampuan untuk terbang.

- JALALUDIN RUMI -

Faber est suae quisque fortunae

“Setiap orang adalah penata dan perancang nasibnya sendiri.”

ABSTRACT

This research aims to determine the implementation or more specifically the implementation of the Sidoarjo Regency stunting management policy in terms of the feasibility of implementing the policy carried out by the Sidoarjo Regency Government. This research method uses qualitative-descriptive with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. Data analysis techniques consist of data reduction, data presentation and drawing conclusions. Based on data in the field, researchers found that the policy implementation cycle was carried out by OPD Regional Apparatus Organizations, one of which was the Health Service, followed by health services at the Community Health Center (Puskesmas) and Village Health Center (POSKESDES). as the lowest structure in supporting the technical implementation of policies in the health sector. In policy implementation, one finds one's own dynamics including the progress and challenges faced in the policy implementation process. Apart from that, health sector infrastructure such as hospitals, transportation units and medical personnel partially meet the requirements criteria. In general, the feasibility of implementing policies in handling stunting in Sidoarjo Regency in terms of feasibility and implementation, there is progress and challenges faced.

Keywords: feasibility, policy implementation, stunting, Sidoarjo Regency.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan atau lebih spesifiknya mengenai implementasi kebijakan penanganan stunting Kabupaten Sidoarjo dalam segi kelayakan implementasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan data di lapangan, peneliti menemukan siklus implementasi kebijakan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah OPD salah satunya Dinas Kesehatan diikuti dengan pelayanan bidang kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pusat Kesehatan Desa (POSKESDES). sebagai struktur paling bawah dalam mendukung implementasi kebijakan secara teknis bidang kesehatan. Dalam implementasi kebijakan menemukan dinamika sendiri meliputi kemajuan dan tantangan yang dihadapi pada proses pelaksanaan kebijakan. Selain itu, Infrastruktur bidang kesehatan seperti Rumah Sakit, Unit Transportasi hingga tenaga medis sebagian memenuhi kriteria kebutuhan. Secara umum, kelayakan implementasi kebijakan dalam penanganan stunting Kabupaten Sidoarjo dari segi kelayakan dan implementasi terdapat kemajuan dan tantangan yang dihadapi.

Kata Kunci: kelayakan, implementasi kebijakan, stunting, Kabupaten Sidoarjo.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim. Maha suci Allah yang telah mempertemukan penulis dengan orang-orang luar biasa yang mengajarkan lebih banyak hal-hal yang sangat bijaksana daripada sekedar dengan bimbingan dalam penelitian dan penulisan skripsi. Puji syukur kepada Allah *Subahahu Wata'ala* yang telah memberikan karunia dan kuasa-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada orang-orang yang terlibat dalam proses tulisan dan penelitian ini, berbagai pengorbanan yang telah diberikan baik secara psikis, fisik, finansial, waktu dan hal-hal yang penulis tidak bisa sebut banyak.

1. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Holilah M.Ag sebagai dosen pembimbing yang senantiasa memberikan dukungan, bimbingan serta nasehatnya selama penelitian berlangsung hingga penulisan skripsi.
2. Kedua, penulis berterima kasih kepada Ajeng Widya Prakasita, MA, selaku dosen perwalian yang telah memandu penulis dalam penyusunan proposal hingga berlanjut penyusunan skripsi
3. Terima kasih yang tak terbatas dan tak pernah usai penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, ibunda Erni Utami dan ayahanda M. Ridwan Ely yang senantiasa memanjatkan doa untuk penulis dalam kelancaran hingga kemudahan dalam penulisan skripsi.
4. Penulis juga berterima kasih kepada sahabat-sahabat Solidaritas, Loyalitas dan Totalitas (SOLOTAS'20) yang bersama terlibat dalam proses menempuh pendidikan strata satu (S1).
5. Penulis berterima menyampaikan terima kasih kepada Kakak Tingkat selama dalam perkuliahan, khususnya M. Panji Saputro yang menolong saya menyadari proses dan kekuatan si penulis ada dimana dan bagaimana menggunakannya secara bijaksana.

Ide penulisan skripsi ini muncul melihat dinamika yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkhususnya Dinas Kesehatan selama tiga tahun terakhir mengalami naik-turunnya presentase penanganan stunting. Inti masalah yang hendak dibedah dalam skripsi ini yaitu bagaimana implementasi kebijakan dalam penanganan stunting Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dari segi kelayakan hingga kemajuan dan tantangan yang dihadapi. Berdasarkan data di lapangan, peneliti menemukan kelayakan implementasi kebijakan yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan Pusat Kesehatan Masyarakat Desa (POKESDES). Kemudian terdapat infrastruktur di bidang kesehatan yang mendukung pelaksanaan kebijakan terdiri dari tenaga medis, alat kesehatan, rumah sakit hingga transportasi khusus. Proses pelaksanaan kebijakan penanganan stunting menuai dinamika dari segi kelayakan yang telah diterapkan sangat baik.

Peneliti, menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat membantu untuk perbaikan dan kesempurnaan akan penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi kecil dan sederhana ini dapat menjadi alat yang besar dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Aamiin Aamiin Ya Robbal Alamin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan laporan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Pralevansi stunting di Provinsi Jawa Timur sebesar 21,6 Persen. Pelaksanaan SSGI 2022 melibatkan Setwapres, Bappennas, BPS, Kemendagri, Poltekkes, Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota serta para pakar dari beberapa universitas. Dasar pelaksanaan kegiatan ini ialah pada PERPRES No. 18 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 PERPRES No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Surat Set Wapres No. B.470/KSNB/SWP/PKM.00/07/2021 tentang pelaksanaan SSGI tahun 2022, Surat Bappenas No. 030007/PP.03.02/D.5/T/3/2022 mengenai urgensi pelaksanaan SSGI oleh Kemenkes. Ini menjadi perencanaan satu tujuan dengan pemerintah nasional dalam program besar yang berfokus pada aspek salah satunya adalah penurunan stunting.¹

Stunting adalah keadaan dimana tinggi badan berdasarkan umur rendah, atau keadaan dimana tubuh anak lebih pendek dibandingkan dengan anak – anak lain seusianya (MCN, 2009). Stunting digunakan sebagai indikator malnutrisi kronik yang menggambarkan riwayat kurang gizi anak dalam jangka waktu lama sehingga kejadian ini menunjukkan bagaimana keadaan gizi sebelumnya (Kartikawati, 2011). Stunting merupakan suatu keadaan dimana tinggi badan anak

¹ Kementerian Kesehatan RI, Survei Status Gizi Indonesia https://ayosehat.kemkes.go.id/pub/files/files46531.MATERI_KABKPK_SOS_SSGI.pdf

yang terlalu rendah. Stunting atau terlalu pendek berdasarkan umur adalah tinggi badan yang berada di bawah minus dua standar deviasi ($<-2SD$) dari tabel status gizi WHO child growth standard (WHO, 2012). Sedangkan menurut UNICEF (United Nations Children's Fund) memandang stunting sebagai masalah gizi kronis yang terjadi pada anak-anak sebagai akibat dari kekurangan gizi dalam jangka waktu panjang, khususnya kurang asupan nutrisi yang cukup pada masa pertumbuhan awal anak, biasanya di bawah usia lima tahun.²

Pada Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Sidoarjo (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 terdapat Prioritas Program Pembangunan Kabupaten yang berfokus pada kesehatan, yakni Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Tujuan dari upaya program percepatan penurunan dan pencegahan stunting ialah revitalisasi pembangunan daerah sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo. Hal ini, mendukung dan sebagai faktor pendorong pelayanan publik yang mendukung kemudahan investasi dan mendukung pertumbuhan industri, perdagangan dan jasa.³

Melalui tinjauan dokumen, peneliti mengidentifikasi beberapa kebijakan yang terkait dengan kebijakan teknis penanganan stunting di Kabupaten Sidoarjo, termasuk penyesuaian peraturan *Top to Bottom* yakni pemerintah nasional dan

² Kementerian Keuangan RI, WHO, Stunting
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate/baca-artikel/15305/Program-Penurunan-Stunting-Apa-Susahnya.html#:~:text=Menurut%20Organisasi%20Kesehatan%20Dunia%20atau,stimulasi%20psikososial%20yang%20tidak%20memadai.>

³ Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023
[DOK PERBUP 75 TAHUN 2022 RKPD 2023.pdf \(sidarjokab.go.id\)](https://sidarjokab.go.id/DOK%20PERBUP%2075%20TAHUN%202022%20RKPD%202023.pdf)

daerah tentang intervensi percepatan penurunan stunting. Melalui wawancara dengan *Key Informan* dari perancang kebijakan yakni pemerintah kabupaten, akademisi kesehatan, dan masyarakat daerah melakukan evaluasi untuk menemukan kesenjangan kebijakan yang diformulasikan hingga kelayakan implementasi yang diterapkan. temuan peneliti ialah terdapat beberapa kesenjangan dalam implementasi kebijakan dengan beberapa OPD. Salah satunya, terdapat *miss leading* dalam birokrasi politik dan beberapa infrastruktur yang tidak memadai untuk melaksanakan program.

Dalam perencanaan tentu memiliki karakteristik yang jelas sehingga memberikan pandangan terdapa nilai kebermanfaatan terhadap kebijakan yang dijalankan baik dalam *Value*, *Operational Visibility*, dan *Politic Acceptability*. Kebijakan lahir karena timbul permasalahan sosial sehingga menyangkut pada kesejahteraan, tentu pemerintah harus mengambil kebijakan sebagai respon terhadap masalah yang ditemui. Kebijakan lahir melalui tahapan proses; Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi pada proses ini merupakan tahapan dasar yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan publik. Pada perencanaan kebijakan memiliki dimensi yang berokus pada proses dan pada implementasi kebijakan merupakan dimensi yang berkaitan dengan dampak dari suatu kebijakan, pembahasan kebijakan publik memiliki karakteristik utama dalam fokus dan lokus dengan proses dan dampak dari suatu dan kebijakan.

Studi ini bertujuan melakukan investigasi terhadap kelayakan implementasi kebijakan terhadap penanganan stunting. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, melakukan komparasi dengan berbagai literatur dan

penelitian terdahulu. Penelitian ini dilakukan dengan analisis data terhadap penanganan stunting Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2021 – 2022.

Penelitian ini menunjukkan terdapat instabilitas dalam penerapan kebijakan sehingga progresivitas menuju tujuan tidak sampai secara maksimal. Selain itu, faktor utama implementasi kebijakan yang tidak membuat tidak sampai pada dampak ialah kontrol kelayakan implelementasi pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada penanganan stunting.

Penelitian ini menunjukkan pelaksanaan kebijakan yang kurang memadai adalah kelayakan implelementasi kurang terkendali. Implikasi dari penemuan ini terdapat pengendalian dan manajemen birokrasi yang kurang sehingga penting untuk menerapkan kontrol birokrasi politik yang cukup memadai agar kelayakan implentasi kebijakan ini dapat diterapkan untuk menncapai tujuan sebagaimana tujuan kebijakan penanganan stunting.

Kesehatan menjadi dasar pelayanan negara untuk memberikan ruang kesejahteraan bagi masyarakat, pencegahan secara preventif maupun pro aktif merupakan langkah taktis yang harus diemban oleh pemerintah nasional maupun daerah sehingga dapat mencegah situasi krisis yang berdampak kepada masyarakat pada titik keseluruhan.

Stunting merupakan urgensi sosial meliputi bidang kesehatan, penyebab stunting menurut Artikel Kemenkeu RI adalah “asupan pola asuh dan nutrisi yang kurang tercukupi sehingga anaHASILk mengalami hambatan daya menyerap pengetahuan dalam memperoleh edukasi dan masa pertumbuhan anak yang lambat.” Peningkatan stunting dapat menghambat masa tumbuh dan potensi yang

dimiliki oleh anak.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai Penekanan Pralevansi Stunting terhadap ibu hamil dan mengandung, terdapat kekurangan intervensi kebijakan oleh pemerintah yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kedua, terdapat implementasi kebijakan yang kurang memadai sehingga siklus kebijakan yang diterapkan kurang optimal. Penelitian tambahan diperlukan untuk mengungkap gap yang terjadi antara kelayakan dengan kelayakan implementasi kebijakan sehingga dapat mengembangkan formulasi strategi implementasi kebijakan yang efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa mengenai kelayakan kebijakan yang berdampak pada implementasi kebijakan. Penelitian ini memberikan presentasi atas identifikasi masalah terhadap kelayakan kebijakan dalam menjalankan kebijakan.

Penelitian yang dilakukan ini berharap, memberikan wawasan mengenai kelayakan kebijakan dalam implementasi kebijakan mengenai kesehatan, penelitian ini berharap dapat membantu pemangku kebijakan untuk menjalankan kebijakan yang cukup efektif dan efisien sehingga dapat melakukan langkah preventif dalam menghadapi tantangan situasi krisis yang akan terjadi,

Dengan memperhatikan urgensi situasi ini penting untuk refleksi kepada pemangku kebijakan daerah dan OPD dalam melakukan kontrol birokrasi dari sebuah kebijakan yang dijalankan. Topik ini dapat menjadi prioritas utama dalam bidang kebijakan penanganan stunting. Sehingga beberapa langkah konkrit perlu diambil untuk segera di implementasikan, serta melakukan tinjauan yang komperhensif untuk merancang system strategi yang konkrit untuk mencapai

tujuan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mengarah pada kontrol birokrasi politik yang memiliki relevansi kelayakan implementasi kebijakan pada penanganan stunting pada Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan dengan teks yang telah dijabarkan diatas yaitu mengenai latar belakang maka dalam mengidentifikasi sebuah permasalahan diatas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Kelayakan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada penanganan stunting?
2. Apa saja kemajuan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada penanganan stunting?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana kontrol pelaksanaan sebuah kebijakan hingga kemajuan dan tantangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada pelaksanaan kebijakan menekan angka stunting.

D. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis

Pada penelitian ini akan bermanfaat dalam memperkaya informasi dan pengetahuan pada bidang Kebijakan Publik dan dalam kemajuan disiplin Ilmu Politik. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan suatu pedoman secara terstruktur serta tersistem tentang bagaimana pelaksanaan suatu kebijakan yang menghasilkan dampak pada sasaran dan target yang ditujukan oleh pemangku

kebijakan.

2. Secara Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan laboratorium ilmu dan informasi untuk para praktisi politik maupun seluruh masyarakat yang berminat serta tertarik dalam rumpun Ilmu Politik terutama dalam bidang Kebijakan Publik pada masa yang akan datang. Diharapkan juga dengan hadirnya penelitian ini dapat memberikan suatu masukan dan rekomendasi terhadap pemangku kebijakan dan beberapa actor yang terlibat pada perencanaan serta pelaksana kebijakan agar bisa memberikan kemajuan edukasi dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan khususnya masyarakat sebagai penerima dari dampak sebuah kebijakan.

3. Manfaat Akademisi

Diharapkan penelitian ini temuan pada penelitian ini menjadi referensi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, khususnya pada program studi Ilmu Politik juga menjadi bahan literasi serta meningkatkan wawasan dan pengetahuan di bidang social dan politik.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini didasarkan pada beberapa sumber penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sebagai bahan referensi atau rujukan yang nantinya akan dikembangkan. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu:

Pertama, penelitian dari Susilawati dan Nadia Hendra Pramata pada jurnal MIRACLE JOURNAL Vol 3, No 2 Juli 2023 dengan Judul “*Literature Review : Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Wilayah*

Pesisir Medan Belawan.” Metode yang digunakan adalah studi literatur dan berdasarkan hasil wawancara serta observasi. Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan penanganan stunting di Wilayah Pesisir Medan, inti pembahasan penelitian ini adalah upaya pelaksanaan pemerintah melakukan distribusi Makanan Bayi dan Anak (PMBA) secara intensif untuk memperbaiki gizi Balita berusia dua tahun. Penelitian yang dilakukan memberikan relevansi pada kebijakan substantive pada Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang diubah menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021.⁴ penelitian ini menemukan pentingnya membangun keselarasan kebijakan strategis dalam melaksanakan sebuah kebijakan sehingga mendapatkan hasil yang optimal dan mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh pemangku kebijakan.

Kedua, Penelitian dari Liza Nurva dan Chatila Maharani pada Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) VOLUME 12, 02 Juni 2023. Dengan judul “Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan *Stunting*: Studi Kasus di Kabupaten Brebes.” Penelitian ini membahas mengenai bagian pelaksanaan penanggulangan stunting terutama berfokus kelayakan teknis pada pelaksanaan kebijakan, hasil penelitian yang diperoleh adalah pelaksanaan kebijakan sudah sesuai pada kebijakan prosedural yang telah di formulasikan namun dalam tahapan pelaksanaan menemukan beberapa tantangan yang diperoleh, diantaranya ialah kurang tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang

⁴ HENDRA, NADIA HENDRA PRATAMA. "LITERATURE REVIEW: ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING DI WILAYAH PESISIR MEDAN BELAWAN." *Miracle Journal* 3.2 (2023): 52-57.

kompeten dan memerlukan intervensi untuk meningkatkan kualitas SDM yang unggul.⁵ Pada penelitian ini pelaksanaan kebijakan mempunyai prioritas dalam mengoptimalkan kelayakan teknis baik dalam Aparatur Manusia (SDM), Infrastruktur dan Finansial.

Ketiga,, Penelitian dari Liza Diah dan Ayu Rosanti pada Karya Ilmiah Skripsi pada tahun 2023, .metode ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan judul “Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Studi Kecamatan Sulang). Pembahasan ini mengenai Pelaksanaan Kebijakan mengenai percepatan penurunan stunting, Implementasi Kebijakan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang dalam percepatan penurunan stunting sudah berjalan dengan baik dari aspek disposisi. Hasil penelitian ini, pada titik membuahkan hasil angka prevalensi stunting kabupaten rembang menurun karena keselarasan strategis dalam pelaksanaan dan keterlibatan aktor dalam menurunkan angka stunting. Namun, pada penelitian yang dilakukan memiliki keterbatasan pada satu daerah saja yang diteliti kemudian, arah masa depan penelitian yang bersangkutan dengan berkelanjutan konklusi penelitian.

Keempat, dari Desvanti Rahman pada Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS) VOLUME 3 NOMOR 5 2023. Dengan judul “Analisis Peran Aktor dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Daerah yang Menangani Covid-19”. Metode penelitian ini menggunakan

⁵ Nurva, Liza, and Chatila Maharani. "Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting: Studi Kasus di Kabupaten Brebes." *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI* 12.2 (2023): 74-83.

pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada beberapa informan kunci serta kajian literatur, penilitan ini memberikan pandangan keterlibatan aktor baik di level Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Tangerang Selatan dengan masing – masing kewenangan serta menjalankan kebijakan dengan sinergitas dan responsive terhadap usaha mendorong keberhasilan implementasi kebijakan yang berkaitan menegnai penanganan Covid-19.⁶ Pembahasan ini memberikan garis besar keterlibatan aktor menjadi faktor pendukung pada tahapan implementasi kebijakan, hali ini berkaitan erat dengan relasi kuasa dalam pelaksanaan kebijakan terutama pada mengelola birokrasi secara sistematis dan terstruktur.

Kelima, penelitian ini dari Fadila Utari, Hairi Salsabila Siregar, dan Naila Nida Barkah pada Media Kesehatan Masyarakat Indonesia 1 Juni 2023 dengan Judul “*Literature Review: Analisis Pelaksanaan Program dan Pencegahan Stunting di Puskesmas*”. Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan cara mengumpulkan dan menalaan penelitian terdahulu serta mencari informasi program pencegahan stunting beserta menghimpun data gizi buruk stunting dari berbagai refrensi jurnal nasional.⁷ Penelitian ini melakukan analisis terkait pelaksanaan program pencegahan stunting di tingkat *local sector* yakni puskesmas, upaya yang dihasilkan adalah tindakan pencegahan stunting seperti beberapa program yang telah formulasikan oleh pemerintah pusat dan

⁶ Rahman, Desvanty. "Analisis Peran Aktor dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Daerah yang Menangani Covid-19." *Jurnal Sosial dan Sains* 3.5 (2023): 503-520.

⁷ Utari, Fadilla, et al. "Literature Review: Analisis Pelaksanaan Program Pencegahan Stunting di Puskesmas." *MEDIA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA* 22.3: 153-163.

Kemeterian Kesehatan RI diantaranya pemberian ASI eksklusif, Pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI), membentuk jadwal control pada satu tahun dua kali yang disebut sebagai bulan timbang yang dilaksanakan pada bulan februari dan agustus, pemeriksaan ibu hamil, Pemberian Tablet Tambah Daragh (TTD), dan pemberian makanan tamabahan (PMT). Pada hal yang sama penelitian ini memberikan salah satu pandangan utama yakni bagaimana mengorganisir program yang dirancang sehingga mencapai tujuan bersama dalam usaha pencegahan stunting secara komperhensif.

Keenam, dari Hutri Gaustino dan Eko Rizqi Purwo Widodo pada Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang Vol 8 No 2 (2022) dengan Judul “Analisis Implementasi Kebijakan Sosial Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Malang”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif naratif, secara penempatan lokasi penelitian berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dengan terfoksukan pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai *leading sector* dalam proses implemntasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang upaya pencegahan stunting, Yaitu dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Pada penelitian ini membahas menegnai implemntasi kebijakan sosial pencegahan stunting di Kabupaten Malang telah berjalan dengan baik namum dalam penelitian ini terdapat dua kertabatan, ⁸Pertama, Kurangnya sinergitas program antar OPD yang secara khusus memilki irisan kegiatan yang berkaitan

⁸ Agustino, Hutri, and Eko Rizqi Purwo Widodo. "Analisis Implementasi Kebijakan Sosial Pencegahan Stunting di Kabupaten Malang." *Sospol: Jurnal Sosial Politik* 8.2 (2022): 241-252.

dengan pencegahan, penanggulangan dan penanganan kasus stunting, termasuk keterlibatan unsur perguruan Tinggi, NGO yang *concern* terhadap persoalan tersebut sampai NGO yang relevan. Kedua, belum meratanya distribusi program untuk setiap titik wilayah DP2KB di seluruh desa/kelurahan Kabupaten Malang. Hal ini memberikan konklusi bahwa belum optimal pada tahap implementasi suatu kebijakan terutama pada pengorganisasian aktor dan Lembaga untuk mencapai target.

Ketujuh, penelitian ini dari Hermawati dan Sastrawan pada Jurnal Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara dengan Judul “Analisis Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Lombok Utara”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, pendekatan ini berfokus dengan kata-kata, gambar, bukanlah angka - angka. Metode ini menggambarkan secara deskriptif dengan analisis implementasi kebijakan program penanggulangan stunting.⁹ Dalam penelitian ini juga menggunakan metode fenomenologi. Ini pembahasan yang diteliti ialah pelaksanaan dan pengorganisasian program stunting pada tataran teknis dengan melibatkan *leading sector* dan beberapa aktor yang terlibat secara intensif dalam penanganan stunting.

Kedelapan, penelitian ini dari Irwan Kurniawan, Misnaniarti dan Rostika Flora pada Jurnal Penelitian Kesehatan (JUMANTIK) Vol 6 No 4 Tahun 2021 dengan Judul “Analisis Implementasi Intervensi Gizi Spesifik dalam

⁹ Hermawati, Hermawati, and Sastrawan Sastrawan. "Analisis Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Lombok Utara." *Jurnal Kesehatan Qamarul Huda* 8.2 (2020): 48-54.

Penanganan Stunting di Puskesmas Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara”. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain fenomenologi.

¹⁰Evaluasi Program dirancang dan beberapa data dokumentasi pada pelaksanaan program dan beserta wawancara kepada Kunci Informan. Penelitian ini membahas intervensi gizi dalam menanggulangi stunting yang dilakukan sesuai dengan mekanisme birokrasi, konsep pengembangan intervensi gizi spesifik dalam penanganan stunting dapat dilakukan dengan komunikasi efektif, disposisi, ketersediaan sumber daya yang mencukupi dan birokrasi yang efisien dan tepat sasaran.

Kesembilan, penelitian ini dari Ilham Nur Hanifan Maulana, Qomariyatus Sholihah dan Wike pada Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Vol 8 No 2 Tahun 2022 dengan Judul “Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik sebagai Upaya Penanganan Stunting di Kabupaten Malang.” Metode penelitian ini dengan pendekatan kualitatif, peneliti melakukan pengkajian secara sistematis terhadap permasalahan dengan panduan kerangka konseptual atau teoritis, dalam penelitian ini melakukan sebuah pendekatan eksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang berkaitan dengan sebuah fenomena sosial yang terjadi. Penelitian ini membahas Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik mengikuti kebijakan prosedural yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Malang pada Peraturan Bupati Malang No 33 Tahun 2018 tentang Upaya Pencegahan Stunting.

¹⁰ Kurniawan, Irwan, Misnaniarti Misnaniarti, and Rostika Flora. "Analisis Implementasi Intervensi Gizi Spesifik dalam Penanganan Stunting di Puskesmas Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara." *JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan)* 6.4 (2021): 328-336.

Kesepuluh, penelitian ini dari Nabila Udzrotu Shauma, Dini Gandini Purbaningrum pada Jurnal Kebijakan Publik Vol 13 No 2 2022 dengan Judul “Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi.” Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian yang dilakukan dalam bentuk penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pengumpulan data, wawancara serta observasi untuk memperkaya informasi pada pengkajian penelitian.¹¹ Penelitian ini berkaitan dengan Implementasi Kebijakan percepatan stunting terintegrasi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, pada pembahasan ini peneliti melibatkan Lembaga dalam upaya pengorganisasian pelaksanaan kebijakan prosedural. Secara sederhana kebijakan prosedural yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan dan kondisi teknis dalam mencapai tujuan kebijakan substantif.

¹¹ Shauma, Nabila Udzrotu, and Dini Gandini Purbaningrum. "Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi." *Jurnal Kebijakan Publik* 13.2 (2022): 200-207.

BAB II

PERSPEKIF TEORITIS DAN ARGUMENTASI UTAMA

A. Perspektif Teoritis

Feasibility Study

Feasibility study atau studi kelayakan merupakan pandangan melihat rencana/proyek pada sisi Pelaksanaan Teknis, Finansial, dan Aparatur Sumber Daya (*Resource*). Studi ini dikembangkan oleh George O'Brien yang menurutnya, studi kelayakan adalah studi awal untuk merumuskan informasi yang dibutuhkan oleh pemakai akhir, kebutuhan sumber daya, biaya, manfaat dan kelayakan proyek yang diusulkan. Analisis kelayakan adalah proses pengukuran dan kelayakan, kelayakan sebaiknya diukur sepanjang siklus hidup.¹²

Teori kebijakan ekonomi feasibility study George O'Brien menganggap bahwa kebijakan publik harus mengedepankan pemahaman terhadap kebijakan publik, baik dari perspektif politik maupun dari perspektif administratif. Selain itu, kebijakan publik juga harus mengambil kira konteks politik dan administrasi, serta kekuasaan, kepentingan dan strategi pelaku kebijakan. Selain itu, teori ini juga mengedepankan gagasan bahwa kebijakan publik sebagai *maximum social gain* yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat secara optimal.¹³

Pendekatan kebijakan ekonomi *feasibility study* George O'Brien suatu metode yang digunakan untuk menganalisis kebijakan ekonomi dengan

¹² Yacob Ibrahim, *Studi Kelayakan Bisnis*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm.

¹³ Tahir, A. (2018). *Kebijakan publik dan good governancy*. Universitas Negeri Gorontalo Medio.

mengumpulkan data, analisis data, dan pengujian alternatif. O'Brien mengemukakan bahwa *Feasibility Study* harus dilakukan dengan tepat dan benar, sehingga dapat menjamin kesesuaian alternatif kebijakan dengan tujuan yang diinginkan.¹⁴

Terdapat kategori pendekatan, alternatif kebijakan dapat dikategorikan menjadi beberapa pendekatan, yakni pendekatan kebutuhan, pendekatan kemungkinan, dan pendekatan kerumitan. Pendekatan kebutuhan merupakan proses identifikasi kebutuhan pengguna informasi yang bersifat mutakhir, dimana pengguna berinteraksi dengan sistem informasi dengan sistem informasi dengan cara sangat umum untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi.

Kedua pendekatan kemungkinan, mengidentifikasi kemungkinan dan kerentanan dari alternatif kebijakan, dan menghitung akumulasi presentase kegagalan dan keuntungan. Pendekatan kedua menekankan perhitungan dan rasio keuntungan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan yang dikategorikan sebagai meramalkan situasi kedepan secara historis dan teknokratis.

Ketiga pendekatan kerumitan, pendekatan ini mengacu pada identifikasi kerumitan dan kebutuhan dari alternatif kebijakan, dengan mengambil biaya, waktu, dan sumber daya yang diperlukan. Pada pendekatan ketiga mengutamakan diagnosa kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang berbasis dengan sumber daya yang dimiliki oleh perancang kebijakan, sehingga menjadi landasan dan penentu sebuah

¹⁴ DR HA Rusdiana, M. M. (2021). *Sistem informasi manajemen pendidikan: Konsep, prinsip, dan aplikasi*. Fitrah Ilhami.

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan.

1. Faktor-Faktor Kelayakan Implementasi Kebijakan Ekonomi.

Faktor-faktor analisis kelayakan implementasi kebijakan ekonomi George O'Brien dalam feasibility study meliputi:

a. Kondisi Lingkungan:

Lingkungan memberikan pengaruh pada ranah implementasi kebijakan, yang mencakup lingkungan sosio-kultural dan keterlibatan penerima program. Pada umumnya situasi sosial selalu menjadi tantangan pada perumus kebijakan, situasi sosial merupakan kondisi yang tidak dapat diprediksi secara statis dan selalu berubah-ubah dan terdapat beberapa kultur pada setiap titik yang menjadi dinamika perumus kebijakan

b. Hubungan antar Organisasi

Dalam implementasi sebuah kebijakan maupun bentuk program memerlukan dukungan dan koordinasi dengan instansi lain (*Political Acceptability*). Hubungan antar organisasi sangat diperlukan untuk koordinasi dan kerjasama sebagai bentuk proses yang terstruktur dalam mencapai keberhasilan suatu kebijakan atau program.

c. Sumber daya organisasi (*Organization Resource*)

Sumber daya sebagai asset/modal adalah bagian penting pada organisasi maupun institusi, implementasi kebijakan didorong dengan sumber daya, baik sumber daya manusia (*Human Resource*) maupun non sumber daya manusia (*Non Human Resource*).

d. Talenta dan Kekuatan agen pelaksana

Faktor ini mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang akan mempengaruhi implementasi suatu program. Keterlibatan struktur dan agensi adalah fondasi utama dalam menentukan siklus implementasi sebuah kebijakan atau program.

e. Analisis Resiko

Melakukan permintaan kepada instansi atau lembaga yang terkait dengan objek studi; dengan melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), aspek sosial, dan aspek ekonomi. Tahapan ini merupakan aspek penerimaan informasi kepada peminta dalam melihat presentase kemungkinan yang timbul dalam beberapa pelaksanaan kedepan, sehingga menemukan titik terjadinya dampak yang diterima kepada instansi atau lembaga pada aktifitas dengan dampak yang massif maupun bertahap.

2. Tujuan Studi Kelayakan

Dalam studi kelayakan, sistem analisis memusatkan perhatian pada aspek kelayakan ekonomis, adapun tujuan studi kelayakan adalah sebagai berikut (Tata sutabri, 2009):

- 1) Menghindari kerugian.
- 2) Menyediakan informasi ekonomis
- 3) Memudahkan pelaksanaan kerja pengembangan proyek sistem
- 4) Memudahkan perencanaan pengembangan proyek sistem
- 5) Memudahkan dalam hal pengawasan
- 6) Memudahkan proses pengendalian

Jangan lupa factor – factor seperti ukuran sistem, seperti tingkat kekomplekan sistem, jumlah personil penyusunan sistem, tingkat keahlian, personil penyusunan sistem, tangka keahlian personil penyusunan sistem, dan lingkungan computer akan mempengaruhi biaya penyusunan sistem. Dalam prakteknya, sistem analis menyertakan penghematan biaya operasi dan peningkatan pendapatan organisasi sebagai keuntungan dari sistem baru.

3. Lingkup Kegiatan Studi Kelayakan

Pada proyek penyusunan sistem, untuk memperbaiki sistem atau memodifikasi sistem, organisasi sering memutuskan untuk melanjutkan proses atau pengembangan sistem informasi tanpa memperhitungkan aspek ekonominya. Dalam kasus ini organisasi tersebut menganggap bahwa penyusunan sistem secara otomatis atau dilanjutkan. Akan tetapi dalam prakteknya sistem analis tetap mempertimbangkan kriteria – kriteria dalam menilai suatu kelayakan. Karena secara umum dari studi kelayakan ini adalah keputusan layak atau tidaknya suatu proyek pembangunan atau pengembangan sistem dijalankan. Adapun lingkup studi kelayakan ini adalah:

- 1) Dimulai dengan membahas kembali hasil – hasil pengkajian awal dan dokumen – dokumen yang berhasil dihimpun dari kegiatan awal.
- 2) Merupaka pra-kegiatan dari tugas – tugas dan kegiatan di dalam *fase analisis* dan rancangan sesitem detail.

4. Proses Kegiatan Studi Kelayakan

Pengoperasian suatu sistem informasi harus dapat memenuhi kebutuhan bisnis atau pemecahan masalah bisnis yang timbul. Oleh karena itu salah satu pertimbangan di dalam evaluasi kelayakan suatu usulan sistem adalah apakah organisasi akan mendapatkan manfaat dengan adanya proses yang lebih efisien setelah sistem yang baru dioperasikann. Adapun kegiatan dalam studi kelayakan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Membuat sistematika dan melakukan proses pengumpulan kegiatan yang harus dilakukan pada tahap ini secara proses adalah proses pengumpulan data untuk mendapatkan uraian tentang sistem yang berjalan saat ini.

2. Menginterpretasikan pengumpulan data

Metode studi kelayakan yang terpenting adalah wawancara dengan pemakai sistem dan pimpinannya yang berhubungan dengan sistem yang berjalan.

3. Membuat kesimpulan dari hasil studi kelayakan

Kegiatan studi kelayakan dimulai dengan pembahasan hasil kajian awal. Kesimpulan ini akan mpertanyaaenjadi dasar untuk membuat rencana kerja yang meliputi penentua tugas – tugas, penunjukan personil untuk menangani tugas – tugas tersebut dan waktu yang dialokasikan untuk menangani tugas – tugas serta kapan tugas – tugas tersebut akan dapat diselesaikan.

5. Produk Akhir Studi Kelayakan

- 1) Laporan studi kelayakan yang akan dilaporkan kepada komite pengarah
- 2) Rencana kerja yang akan dilaksanakan di dalam proses pengembangan
- 3) Penyiapan kertas kerja dan dokumen untuk kegiatan pada tahap berikutnya.

6. Langkah – langkah Analisis Sistem

langkah – langkah di dalam Analisis Sistem, langkah – langkah dasar yang harus dilakukan oleh analisis sistem adalah:

1. *Identify*, mengidentifikasi masalah

Mengidentifikasi (menenal) masalah merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam tahap analisis sistem. Masalah (*Problem*) dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan yang diinginkan untuk dipecahkan. Masalah inilah yang menyebabkan sasaran dari sistem tidak dapat dicapai. Oleh karena itulah pada tahap analisis sistem, langkah pertama yang harus dilakukan oleh analisis sistem adalah mengidentifikasi terlebih dahulu masalah – masalah yang terjadi.

Tugas – tugas yang harus dilakukannya adalah sebagai berikut ini:

- a. Mengidentifikasi penyebab masalah
- b. Mengidentifikasi titik keputusan
- c. Mengidentifikasi personil – personil kunci

2. *Understand*, memahami kerja sistem yang ada

langkah kedua dari tahap analisis sistem adalah memahami kerja dan sistem yang ada. Langkah ini dapat dilakukan dengan mempelajari secara terinci bagaimana sistem yang ada beroperasi. Untuk memperajari secara terinci bagaimana sistem

yang ada beroperasi. Untuk mempelajari secara terinci bagaimana sistem yang ada beroperasi. Untuk mempelajari operasi dari sistem ini diperlukan data yang dapat diperoleh dengan cara melakukan penelitian. Bila di tahap perencanaan sistem juga pernah dilakukan penelitian untuk memperoleh data, penelitian ini sifatnya adalah penelitian pendahuluan (*preliminary*). Sedang pada tahap analisis sistem, penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian terinci (*Detailed Survey*).

Analisis sistem perlu mempelajari apa dan bagaimana operasi dari sistem yang ada sebelum mencoba untuk menganalisis permasalahan – permasalahan, kelemahan – kelemahan dan kebutuhan – kebutuhan pemakai sistem untuk dapat memberikan rekomendasi pemecahannya. Sejumlah data perlu dikumpulkan menggunakan Teknik pengumpulan data yang ada, yaitu wawancara, *observasi*, daftar pertanyaan dan pengambilan sampel.

3. *Analyze*, menganalisis sistem

a. Menganalisis kelemahan sistem

Analisis sistem perlu menganalisis masalah yang terjadi untuk dapat menentukan jadwal apa penyebab sebenarnya dari masalah yang timbul tersebut.

b. Menganalisis kebutuhan informasi pemakaian / manajemen

Tugas lain dari analisis sistem yang masih diperlukan sehubungan dengan sarana utama sistem informasi, yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi para pemakainya perlu dianalisis.

4. *Report*, membuat laporan hasil analisis

Setelah proses analisis sistem selesai dilakukan, tugas berikutnya dari analisis sistem adalah membuat laporan hasil analisis yang nantinya akan diserahkan kepada manajemen. Tujuan utama dari penyerahan laporan ini kepada manajemen adalah:

- a. Pelaporan bahwa analisis telah selesai dilakukan
- b. Meluruskan mengenai kesalahan satu pengertian mengenai apa yang telah ditentukan dan dianalisis oleh analisis sistem tetapi tidak sesuai menurut manajemen.
- c. Meminta pendapat – pendapat dan sasaran – sasaran dari pihak manajemen
- d. Meminta persetujuan kepada pihak manajemen untuk melakukan tindak selanjutnya (meneruskan ketahap desain sistem atau menghentikan proyek bila dipandang tidak layak lagi).

Analisis Kebijakan Publik (*William Dunn*)

Dalam perspektif teoritis, William Dunn menyediakan teori dan metode untuk memahami dan menganalisis kebijakan publik. dengan menggunakan analisis kebijakan, proses pembuatan kebijakan, dan factor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, Dunn berpendapat hal ini dapat membantu pengambilan keputusan untuk membuat kebijakan publik yang efektif dan efisien.

Analisis kebijakan publik pandangan dun adalah analisis kebijakan yang dipahami sebagai sebuah aktifitas intelektual dan praktis yang bertujuan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan dalam proses analisis kebijakan. Pandangan dunn, analisis kebijakan adalah ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah – masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu kebijakan.¹⁵

Analisis kebijakan adalah suatu jenis penelaahan yang menghasilkan informasi sedemikian rupa yang dapat dijadikan dasar-dasar pertimbangan para pembuat kebijakan dalam memberikan penilaian-penilaian terhadap penerapan kebijakan sehingga diperoleh alternative-alternatif perbaikannya. Kegiatan penganalisan kebijakan dapat bersifat formal dan hati – hati yang melibatkan penelitian mendalam terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi suatu program yang telah dilaksanakan.

Implementasi kebijakan publik menurut Willaw Dunn merupakan proses pelaksanaan aksi-aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu. Implementasi kebijakan melibatkan pengendalian aksi-aksi kebijakan yang telah ditetapkan., dimana kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan, yaitu isi kebijakan, konteks pelaksanaan kebijakan, dan karakteristik organisasi, sangat diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Pada konteks implementasi kebijakan, faktor-faktor seperti kondisi lingkungan,

¹⁵ Rokim, R. (2019). Analisis Kebijakan Versi Dunn & Implementasinya Dalam Pendidikan Islam. *Pancawahana: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 60-69.

kondisi sosial ekonomi, politik, sikap pelaksanaan, dan kemampuan pelaksana memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu program kebijakan.

Pada metode analisis versi Dunn terdapat lima prosedur yang harus dilewati dalam sebuah proses analisis kebijakan, yaitu:

1. Definisi: menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.
2. Prediksi: menyediakan informasi dengan konsekuensi di masa datang dari penerepan alternatif kebijakan, termasuk jika melakukan sesuatu.
3. Preskripsi: menyediakan informasi mengenai nilai konsekuensi kebijakan di masa datang.
4. Deskripsi: menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu diterapkannya alternatif kebijakan.
5. Evaluasi: kegunaan alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah.

Menurut Kosmir pada penelitiannya tujuan analisis kebijakan tokoh William N. Dunn adalah untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan dalam proses analisis kebijakan. Dunn menjelaskan bahwa analisis kebijakan adalah ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannya

suatu kebijakan.¹⁶

Analisis kebijakan memiliki tiga poin utama pertanyaan diantaranya Pertama Nilai, pencapaian yang dihasilkan dan dirumuskan berdasarkan tolak ukur utama untuk menilai kinerja kebijakan. Kedua, maksud menjelaskan secara general dan spesifik apa yang diinginkan dari kebijakan. Ketiga merupakan tujuan, pertanyaan ini menjelaskan bagaimana kebijakan akan mencapai tujuan yang diinginkan. Tiga poin utama pertanyaan ini menjadi hal terpenting yang mendasari peneliti untuk membantu proses analisis kebijakan.

B. Argumentasi Utama

Studi kelayakan merupakan alat analisis komperhensif dalam melihat pelaksanaan kebijakan pada semua aspek untuk menentukan tingkat keberhasilan yang akan dicapai, apakah pelaksanaan kebijakan itu mencapai tujuan atau sebaliknya.

Pelaksanaan atau implemnetasi kebijakan berkaitan dengan dampak yang mengenai sasaran atau target yakni masyarakat Indonesia. Kebijakan yang dimaksud adalah penanganan stunting di Kabupaten Sidoarjo pada, lokasi ini memiliki angka fluktuasi sehingga ini menjadi suatu tantangan pemerintah kabupaten dalam menekan angka stunting. Kemudian, masyarakat sebagai penerima dampak dari pelaksanaan kebijakan terkait stunting.

¹⁶ Rokim, R. (2019). Analisis Kebijakan Versi Dunn & Implementasinya Dalam Pendidikan Islam. *Pancawahana: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 60-69.

Adanya usaha oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada menekan angka stunting yang mulai naik pada tahun 2022, hal ini digambarkan pada SSGI dan RKPD Sidoarjo baik secara program, finansial, SDM yang mendukung hingga manajerial pelaksanaan kebijakan.

Melihat pelaksanaan atau implementasi dari sebuah kebijakan, maka argumentasi utama peneliti adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berhasil melaksanakan kebijakan pada upaya menekan angka stunting pada tahun 2022. Hal ini didukung dengan oleh keterlibatan SATGAS, *Leading Sector* dan *Frontliner* Puskemas terutama Pondek Kesehatan yang tersebar di beberapa Desa Sidoarjo. Proses di belakang layar seperti perencanaan, menetapkan hingga penerapan tentu memiliki banyak tantangan yang terjadi. Hal ini yang akan peneliti temukan untuk membedah rangkaian proses kelayakan kebijakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis dan Problema Penelitian

Metode yang digunakan deskriptif kualitatif sebagai metode pada penelitian ini. Penggunaan jenis penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengeksplorasi keadaan sosial penelitian secara komperhensif.¹⁷ Dengan tujuan tersebut, maka penelitian mencoba untuk mendapat dan memberikan data yang valid dan kredibel. Problema penelitian ini adalah melihat bagaimana kelayakan implementasi atau pelaksanaan sebuah kebijakan penanganan stunting Kabupaten Sidoarjo dalam segi mekanisme atau proses.

2. Unit dan Peringkat Analisis

Penelitian ini menggunakan unit di level desa sebagai ruang lingkup penelitian, adapun perangkat analisis dalam penelitian terdiri dari beberapa aktor, yakni Pemerintah Kabupaten dan Desa sebagai penyelenggara pemerintah, Puskesmas dan Ponkesdes sebagai pihak yang membantu pelaksanaan kebijakan, dan masyarakat sebagai penerima kebijakan.

¹⁷ Nurhasanah, Nurhasanah, Lisman Manurung, and Siti Juliaha. "Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah." *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 11.1 (2023).

3. Situasi Sosial, Sampel dan Teknik Sampling

Kabupaten Sidoarjo memiliki luas wilayah sebesar 719,34 Km² dan terbagi 18 kecamatan, kecamatan terluas adalah Kecamatan Jabon. Kabupaten Sidoarjo memiliki simbol segilima, berbintang satu, serta setangkai padi, delapan belas butir dan sebatang tebu lima ruas dengan bentuk bulat. Simbol Kabupaten Sidoarjo memiliki beberapa warna diantaranya biru laut, kuning, hitam dan abu-abu. Semua itu memiliki filosofi masing-masing, namun banyak yang tidak mengetahui filosofi tersebut, termasuk warga lokal Kabupaten Sidoarjo.

Kabupaten Sidoarjo dikenal dengan sebutan kota “Delta” karena dihempit dua sungai besar, yaitu Kali Brantas di Surabaya dan Kali Porong di Sidoarjo. Terdapat beberapa Kecamatan Sedati, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Waru, Kecamatan Taman, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Krian, Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan, Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Jabon, Krembung,, Prambon, Kecamatan Porong, Kecamatan Sedati,, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Tarik ,Kecamatan Tulangan, Waru dan Wonoayo.

Penelitian ini menggunakan beberapa pihak sebagai sampel penelitian terutama pihak pemerintah kabupaten yang menyelenggarakan dan masyarakat sebagai penerima kebijakan serta Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo sebagai pihak pendukung dalam implementasi kebijakan yang membantu menekan angka prevalensi stunting. Ketiga pihak diteliti untuk mendapatkan data yang kredibel serta dapat dipertanggungjawabkan dengan yang terjadi di lapangan.

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling untuk memilah individu-individu dari ketiga pihak yang memiliki kualifikasi struktur penting. Pada pihak penyelenggara yakni Pemerintah Kabupaten, peneliti akan menggali informasi kepada Kepala Peningkatan Kesehatan Masyarakat ataupun yang mewakili. Pada pihak Pengamat Kebijakan Publik, peneliti akan meninjau informasi kepada Dosen Ilmu Administrasi Negara/Kebijakan publik atau yang mewakilinya. Di pihak masyarakat, peneliti akan menggali informasi kepada beberapa masyarakat yang dekat dan merasakan dampak dari pembangunan infrastruktur dengan kualifikasi Ibu Hamil dan Ibu yang mempunyai balita usia dua tahun (BATUTA) dan berdomisili di beberapa Kecamatan daerah kabupaten Sidoarjo.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data secara valid, menyeluruh, kredibel, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka peneliti akan menggunakan beberapa cara Teknik pengumpulan data, seperti observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Pada penelitian ini peneliti akan melakukan observasi berupa mengamati secara langsung kondisi dan perkembangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan menekan angka prevalensi stunting serta melakukan kontak langsung kepada masyarakat secara berkala untuk memperoleh pandangan murni akan kondisi yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Peneliti akan meninjau informasi secara mendalam dengan pihak terkait

yaitu pemerintah kabupaten yang terdiri dari Kepala Bidang Kesejahteraan Masyarakat ataupun pihak yang mewakili bidang tersebut. Selain itu, peneliti juga akan menggali informasi secara mendalam kepada masyarakat dengan kualifikasi Ibu Hamil dan Ibu yang memounya balita umur dua tahun (BATUTA) dan berdomisili di Desa Ngingas. Lalu pada Dinas Kesehatan peneliti akan menggali informasi kepada Kepala Bidang program Kesejahteraan Ibu dan Anak atau yang mewakili bidang tersebut. Ketiga pihak di teliti untuk mendapatkan data yang kredibel dan sesuai fakta di lapangan.

c. Dokumentasi

Penelitian akan melakukan dokumentasi berupa foto, video dan rekaman saat melakukan observasi dan wawancara mendalam kepada pihak-pihak sebagai berita online untuk menunjang penelitian dan mendapat data yang valid dan kredibel.

5. Teknik Analisis Data

Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan tahap analisis data menurut Miles dan Hubberman (1992:16). Ketiga Teknik tersebut bisa dijelaskan, yakni:

a. Reduksi Data

Proses pemilihan data kasar dari catatan lapangan untuk disederhanakan merupakan konsep dari Reduksi data. Data yang didapatkan dari pihak pemerintah kabupaten dan masyarakat kemudian diolah untuk dipilah sesuai topik penelitian untuk menunjang penyajian data lapangan.

b. Penyajian Data

Bagian ini berisikan informasi yang terkumpul yang disusun untuk memunculkan pengambilan tindakan atas penarikan kesimpulan. Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara jelas dan objektif sehingga dapat diambil benang merah atau kesimpulan dari suatu penelitian.

c. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tindakan meberifikasi kesimpulan-kesimpulan saat penelitian berlangsung. Hal ini merupakan bagian dari proses konfigurasi yang utuh. Peneliti dapat mengambil inti sari penelitian yang telah dilaksanakan untuk menjawab rumusan masalah.

B. Rencana Sistematika Skripsi

berdasarkan panduan skripsi FISP 2023, maka rencana sistematika skripsi ini berisikan beberapa bab. Bab pertama atau pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan ide dasar pengangkatan tema penelitian, focus penelitian berisikan rumusan masalah, tujuan penelitian berisikan jawaban yang akan diperoleh dari hasil penelitian, manfaat penelitian menjelaskan dampak yang diharapkan dari adanya penelitian yang dilakukan, kajian pustaka merupakan penelitian – penelitian terdahulu sebagai referensi penelitian agar menemukan kesamaan dan *research gap* digunakan sebagai keterbaruan penelitian, sistematika penulisan skripsi berisi penjelasan struktur dalam tulisan penelitian.

Pada bab kedua berisikan perspektif teoritis yang menjelaskan teori-teori yang digunakan sebagai kompas penelitian dan argumentasi utama sebagai jawaban sementara maupun perkiraan dari rumusan masalah berdasarkan

temuan-temuan awal. Kemudian, pada bab ketiga atau metode penelitian berisikan jenis dan problema penelitian yang menjelaskan jenis penelitian yang digunakan serta menjelaskan masalah yang diangkat dalam penelitian, unit dan perangkat analisis menjelaskan ranah level penelitian dan aktor-aktor yang akan diteliti. Situasi sosial, sampel dan Teknik sampling menjelaskan keadaan wilayah yang diteliti berdasarkan kondisi maupun kultur yang ada dengan memilih sampel sebagai pihak yang diteliti menggunakan teknik sampling yang dipilih agar menemukan kualifikasi narasumber yang sesuai dan kredibel. Teknik pengumpulan data menjelaskan cara-cara yang dilakukan dalam memperoleh data, teknik analisis data menjelaskan cara penganalisisan data agar tidak keluar konteks penelitian, teknik validasi berisikan konfirmasi data yang diperoleh agar mendapat kepastian data.

Pada bab keempat berisikan temuan penelitian yang menjelaskan perolehan-perolehan data pada saat dilakukan penelitian dan pembahasan menjelaskan data yang diperoleh secara detail untuk menemukan jawaban sesuai realitas. Terakhir, pada bab kelima berisikan kesimpulan yang menjelaskan inti dari penelitian dan jawaban atas rumusan masalah dan saran berisikan masukkan untuk penelitian selanjutnya maupun perbaikan mengenai situasi maupun kondisi yang ada.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengantar

Pelaksanaan Observasi lapangan untuk proses penelitian diperlukan pengetahuan mengenai gambaran umum (*general*) lokasi yang hendak diteliti. Tahapan ini menjadi hal penting untuk dilakukan untuk identifikasi karakteristik alam, masyarakat, dan lingkungan untuk mendapat kemudahan pada pelaksanaan penelitian. Pada Bab IV akan membahas mengenai profil atau gambaran umum Kabupaten Sidoarjo mulai dari kondisi geografis, kelembagaan, visi – misi, Sumber Daya, Sarana dan Prasarana sebagai hal utama untuk analisis pada bab V dan VI.

B. Kondisi Geografis Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 18 kecamatan, diantaranya meliputi Kecamatan Sidoarjo, Balongbendo, Buduran, Candi, Gedangan, Jabon, Krembung, Krian, Prambon, Porong, Sedati, Sukodono, Taman, Tanggulangin, Tarik, Tulangan, Waru dan Wonooyo. Luas wilayah daratan sekitar 714,245 km sedangkan luas wilayah lautan sekitar 201,687 km. kabupaten Sidoarjo terletak antara 112o5' dan 112o9' Bujur Timur dan antara 7o3' dan 7o5' Lintang Selatan (Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 2016). Kabuoaten Sidoarjo memiliki batas-batas wilayah seperti yang terlihat, yaitu sebagai berikut:

- a. Batas sebelah utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik;
- b. Batas sebelah selatan : Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto;
- c. Batas sebelah timur : Selat Madura;

d. Batas sebelah barat : Kabupaten Mojokerto.

C. Kelembagaan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan temuan peneliti dari hasil penelusuran dokumen yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, peneliti mendapatkan informasi mengenai susunan organisasi. Terdapat Kepala Dinas, Sekretaris dan empat unsur pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo terdiri dari: 1) Bidang Peningkatan Kesehatan Masyarakat, 2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 3) Bidang Kefarmasian dan Sarana Kesehatan, 4) Bidang Pelayanan Kesehatan. Selengkapnya akan di presentasikan dalam table dibawah ini:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO			
Kepala Dinas			
Sekretaris			
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
Bidang Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.	Bidang Kefarmasian dan Sarana Kesehatan	Bidang Pelayanan Kesehatan.
UPTD			

Sumber: Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2022
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo

D. Visi dan Misi Dinas Kesehatann Kabupaten Sidoarjo

1. Visi

“Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan.”

Berdasarkan visi tersebut bahwa Sejahtera dan Berkelanjutan menjadi rancangan utama kebijakan dan implemntasi kebijakan pada bidang kesehatan. Terutama hal ini berkaitan dengan tujuan penelitian yang melihat kelayakan implementasi dari kebijakan.

2. Misi:

- a) Meningkatkan kualitas dan standar pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
- b) Meningkatkan tantan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlaqul karimah, berlandasan keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertibam;

3. Motto

Berorientasi Pelayanan, Akuntabel ,Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif , Kolaboratif.

E. Sumber Daya Dinas Kesehatan

Sumber daya merupakan salah satu bentuk modal dasar bagi setiap organisasi baik swasta maupun pemerintah. Sumber daya Manusia (SDM) adalah induvidu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai asset sehingga harus

dilatih dan dikembangkan kemampuannya.¹⁸ Berkaitan dengan hal tersebut peneliti mendapatkan dokumen SDM Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya sumber daya manusia Dinas Kesehatan yang dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Tenaga medis, terdiri dari: dokter, dokter spesialis dan dokter gigi;
- b) Tenaga paramedis yang terdiri dari: perawat (AKPER, SPK), perawat gigi (D3, SPRG), bidan (AKBID, PSB);
- c) Tenaga pembantu paramedis : pekarya kesehatan;
- d) Tenaga non medis – penunjang, antara lain : farmasi (Akademi Farmasi, SMF), analis (D3 Analis, SMAK), gizi (AKZI, SPAG);
- e) Tenaga non medis : SKM, kesehatan lingkungan (AKL, APK, SPPH);
- f) Tenaga non kesehatan

Berdasarkan SDM yang dikelompokkan, terdapat beberapa tenaga kesehatan memiliki kualifikasi pada bidang tertentu dan tenaga pembantu yang menopang produktifitas. Adapun jumlah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo (termasuk UPTD Kesehatan) dapat dilihat dari Tabel

¹⁸ Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo 2021-2026

Tabel Jenis, Jumlah Personil Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Instalasi

Farmasi Kesehatan (GFK) Sidoarjo Tahun 2020.

No.	Uraian	Dinkes	Puskesmas	GFK	Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya.	Total
1.	Dokter	3	136		450	589
2.	Dokter spesialis	-	-		545	545
3.	Dokter gigi	-	56		141	197
4.	Apoteker	2	15	1	160	178
5.	Akademi Farmasi (D3, SMF)	2	45	1	259	307
6.	SKM	19	29		72	120
7.	Kesling (AKL, APK, SPPH)	2	25		23	50
8.	Perawat (Akper, SPK)	4	498		2526	3028
9.	Perawat gigi (D3, SPRG)	-	-	-	-	(masuk dalam

						data perawat)
10.	Bidan (Akbid, P2B)	4	414		569	987
11.	Analisis Kesh (D3, SMAK)	2	50			234
12.	Gizi (AKZI, SPAG)		743		74	117
13.	Pekarya Kesehatan	0	0			0
14.	Tenaga non Kesehatan	46	233	7		286
15.	Dokter PTT Pusat	0	3			3
16.	PTT Daerah	0	91			91

Sumber: Data Profil Dinas Kesehatan 2020

Peneliti melakukan literature review pada Jumlah Personil medis dan para medis pada puskesmas yang tersebar, sejumlah 27 Puskesmas dan 56 Puskesmas Pembantu (Pustu), rata-rata setiap puskesmas akan memiliki 3 personil dokter umum, 1 dokter gigi, 1 tenaga farmasi (D3, SMF), 8 – 12 perawat, 8 – 12 bidan. Namun peneliti menemukan beberapa peraturan tentang ratio ideal kecukupan dokter dengan jumlah penduduk.

Menurut Permenkes 75 tahun 2014 ratio ideal kecukupan dokter disbanding dengan jumlah penduduk adalah 1: 100.00 penduduk, sehingga kecukupan ideal dokter di Kabupaten Sidoarjo diluar Rumah sakit yang mimilii jumlah penduduk lebih kurang 2. 1 juta, seharusnya kecukupan dokter pada angka 2.100 dokter. Namun Dinas Kesehatan membuat rencana preventif dengan merekrut personil/pegawai tidak tetap dengan biaya insentif dari Puskesmas sebagai BLUD. Ratio personil yang dimiliki Dinas Kesehatan sangat berbanding jauh dengan Permenkes 75 tahun 2014.

Pada dasarnya keberadaan sumber daya manusia atau tenaga medis yang dimiliki Dinas Kesehatan dan Puskesmas diungkapkan telah mampu memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat, hal ini tertulis pada Rencana Strategi (RENSTRA) 2021 – 2026 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

F. Sarana dan Prasana Dinas kesehatan

Dinas kesehatan memiliki sarana dan prasaran untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana yang dimaksud adalah Klinik dan Pelayanan Layanan Kesehatan dan atau bentuk layanan kesehatan lainnya. Peneliti melihat beberapa sarana dan prasana yang dimiliki Dinas Kesehatan sebagai asset/modal untuk menunjang pelaksanaan tugas dan optimalisasi implementasi kebijakan. Beberapa sarana dan prasaran Dinas Kesehatan meliputi

